

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maritim adalah istilah Indonesia yang mengadopsi dari bahasa Inggris yang berarti perairan atau zona laut dan mengindikasikan mengenai potensi-potensi yang dimiliki dalam bidang subsektor perikanan ditinjau dari segi sumberdaya ikan yang tersedia serta jumlah produktifitas yang dihasilkan oleh para nelayan. Diketahui bahwa Indonesia pernah memiliki kejayaan dibidang maritim namun kejayaan tersebut pada masa sekarang hanya tinggal sejarah, disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang dibarengi dengan perilaku yang kapitalis.

Penggunaan teknologi yang canggih memiliki eksternalitas yang negatif dan positif, eksternalitas positifnya adalah dengan teknologi canggih dapat memudahkan aktifitas dan menjangkau apa yang tidak bisa kita jangkau. misalnya semula ketika nelayan pada zaman dulu berlayar dan menangkap ikan sampai dengan berminggu-minggu dan bahkan berbulan-bulan, maka dengan adanya teknologi canggih tersebut dipersingkat menjadi hitungan jam saja. Eksternalitas negatifnya adalah dengan penggunaan teknologi canggih apa yang sebelumnya tidak dapat kita jangkau akan dapat terjangkau. Maksudnya adalah ketika pada zaman dahulu ladang minyak bumi, bom, potas dan lain sebagainya belum ada dan belum digunakan di Indonesia maka kemudian dengan adanya teknologi yang canggih semua hal tersebut dapat terjangkau akibatnya banyak pengeboran dilaut lepas, penggunaan bom dan potas dalam penangkapan ikan, sehingga dampak selanjutnya adalah hancurnya rumah-rumah ikan yakni terumbu karang dan populasi ikan akan semakin berkurang hal tersebutlah yang

menjadi alasan Indonesia tidak lagi memiliki taring di-sub sektor perikanan tersebut, belum lagi jika ada kasus penangkapan ikan ilegal. Biasanya penangkap ikan ilegal berasal dari luar negeri yang otomatis teknologi yang digunakan dalam menangkap ikan juga jauh lebih maju ketimbang nelayan lokal, maka dampaknya nelayan lokal hanya akan menikmati hasil tangkapan yang tidak maksimal dan hanya sebagian persen saja.

Setelah itu dimasa sekarang kembali masa keemasan dibidang maritim tersebut berusaha untuk dijangkau kembali melalui beberapa rencana aksi yang dibuat oleh pemerintahan Indonesia. Salah satunya adalah menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut. Melalui pengembangan industri perikanan dengan nelayan sebagai pilar utamanya. Dalam data laporan Jawa Timur dalam angka tahun 2017 (lihat Tabel 1.1), di Madura yang paling banyak berkontribusi produksi dibidang subsektor perikanan adalah Sumenep, dengan produksi hasil laut sebanyak 46.672,80 ton. Di Sumenep sendiri penyumbang produksi terbesar disubsektor perikanan adalah Kecamatan Dungkek, dengan produksi perikanan 4.662 ton, Ambunten sebesar 3.996 ton, Sapeken sebesar 3.499 ton serta Masalembu sebanyak 3.146 ton (lihat dalam tabel 1.2) (Sumenep dalam angka, 2017) .

Tabel 1.1

Produksi Perikanan Tangkap Perikanan Laut Menurut Kabupaten subsektor di Jawa Timur (ton) 2015 dan 2016

No	Nama Kab/kota	Perikanan Laut	
		2015	2016
1	Bangkalan	25 115,30	25 693,50
2	Sampang	7 130,90	8 942,80
3	Pamekasan	24 391,90	23 190,20
4	Sumenep	46 758,20	46 672,80

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa timur, 2017

Tabel 1.2

Produksi Perikanan Tangkap Perikanan Laut Menurut Kecamatan subsektor di Sumenep (ton) 2016

No	Nama Kecamatan	Produksi laut (Ton)
1	Pragaan	2.220
2	Bluto	1.029
3	Saronggi	2.115
4	Giligenting	838
5	Talango	2.130
6	Kalianget	1.210
7	Kota Sumenep	0
8	Batuan	0
9	Lenteng	0
10	Ganding	0
11	Guluk-Guluk	0
12	Pasongsongan	2.424
13	Ambunten	3.996
14	Rubaru	0
15	Dasuk	1.068
16	Manding	0
17	Batuputih	1.448
18	Gapura	674
19	Batang-Batang	1.697
20	Dungkek	4.662
21	Nonggunong	1.302
22	Gayam	1.619
23	Raas	2.840
24	Sapeken	3.499
25	Arjasa	1.238
26	Kangayan	1.042
27	Masalembu	3.146

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumenep, 2017

Dengan kondisi terumbu karang yang sangat mengkhawatirkan seperti yang dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh pusat penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dikatakan saat ini

Sekitar 35,15 persen terumbu karang dalam kondisi jelek, 35,06 persen dalam kondisi cukup, 23,40 persen dalam kondisi baik, dan hanya sekitar 6,39 persen terumbu karang yang masih dalam kondisi sangat baik. Pengamatan ini dilakukan di 108 lokasi dan 1.064 stasiun pantai diseluruh perairan Indonesia (Muhammad et al., 2017). Dengan begitu sudah nampak permasalahan dalam kemaritiman ini terlebih lagi kepada para nelayan, dengan rusaknya terumbu karang tersebut maka sudah pasti ikan-ikan akan bermigrasi ketempat yang terumbu karangnya masih bagus. Hal tersebut banyak terjadi khususnya diperairan Masalembu. Kondisi terumbu karang yang masih bagus biasanya adalah yang berada pada laut yang sangat dalam, yang artinya dengan hancurnya terumbu karang diperairan yang dangkal, maka ikan-ikan akan bermigrasi kedaerah yang perairannya dalam. Sehingga dampaknya mereka para nelayan harus menambah porsi pembelian bahan bakar minyak (menambah modal). Sedangkan diketahui bahwa kondisi nelayan masih bergantung pada cuaca, musim ikan serta harga yang seringkali dipermainkan oleh pembeli ikan sehingga menjadi sangat murah dan sangat tidak sesuai dengan harga yang berlaku didaratan.

Dalam prosesnya untuk melindungi maritim para penduduk nelayan Masalembu membentuk suatu lembaga masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keberlangsungan pangan mereka yakni perikanan. Saat ini didaerah Masalembu terdapat 9 LPMN (Lembaga Pemberayaan Masyarakat Nelayan). Hal tersebut dibentuk dengan berdasarkan pada jumlah kawasan perairan yang sering dijadikan lumbung untuk memanen ikan. Menurut Djogo, dkk, (2003) Lembaga merupakan sistem yang kompleks yang mencakup berbagai hal yang berhubungan dengan konsep sosial,

psikologis, politik dan hukum. Konsep lembaga/kelembagaan telah banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi, hukum dan politik. Dalam bidang sosiologi dan antropologi kelembagaan banyak ditekankan pada norma, tingkah laku maupun adat istiadat. Dalam ilmu politik kelembagaan banyak ditekankan pada aturan main, kegiatan kolektif untuk kepentingan bersama. Dalam ilmu psikologi menegaskan pentingnya kelembagaan dari sudut pandang tingkah laku manusia. Sedangkan dari ilmu hukum melihatnya dari sudut hukum atau regulasinya serta instrumen dan litigasinya (Yudha, 2012). Sesuai dengan definisinya yakni suatu kelembagaan merupakan suatu interaksi sosial, berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan, dan kelembagaan juga tidak luput dari suatu aturan main demi kepentingan bersama. Definisi tersebut menggambarkan suatu intraksi atau peran dari masyarakat nelayan yang ada di Masalembu untuk *mensustainable* pangan ikan mereka. Yaitu seringkali masyarakat lokal mendapati nelayan yang dari luar daerah, merusak rumah ikan (*Rumpon*) yang telah dibuat oleh para nelayan Masalembu. Salah satunya dengan menggunakan cantrang atau pukot harimau. Rumah-rumah ikan yang dibuat oleh nelayan masalembu modalnya sangat besar yang terdiri dari bambu sejumlah 10 sampai 15 bambu dan harga dari per-1 bambu biasanya dihargai Rp. 15.000 sampai dengan Rp. 30.000 kemudian daun kelapa (Lerep) sebanyak 100 sampai dengan 200 buah yang dihargai sejumlah Rp. 2000 sampai dengan Rp. 3000 serta tali besar dan pengapung seharga Rp. 200.000 dan hal tersebut terus berulang-ulang tiap bulan.

Mereka (nelayan luar daerah) yang menangkap ikan tidak memperhatikan lingkungan dan semena-mena pada perairan dan rumah ikan yang telah dibuat oleh nelayan lokal. Seringkali mereka (nelayan luar daerah) memutus dan

merusak investasi dari nelayan lokal juga memanen ikannya dengan pukot harimau dan alat tangkap lainnya akibatnya mata pencaharian nelayan lokal yang semula hanya bergantung pada investasi tersebut menjadi rusak dan tidak mempunyai harapan dalam menangkap ikan (mengurangi pendapatan real masyarakat nelayan). Sehingga masyarakat yang berprofesi nelayan sepakat ketika mendapati nelayan luar daerah yang ditemui sedang memanen ikannya dan memutuskan mata pencaharian mereka, mereka menangkapnya ditengah lautan kemudian digiring ke daratan dan perahu yang digunakan mereka kerap dibakar oleh masyarakat lokal, karena mereka yang semula sudah diperingati untuk tidak merusak *Rumpon* mereka tetap saja kembali datang dan merusaknya sehingga oleh nelayan luar daerah, nelayan lokal kerap disebut sebagai bajak laut. Dari proses peranan nelayan lokal tersebut dalam melindungi mata pencahariannya dan dalam usaha peningkatan kesejahteraannya (pendapatan) disitu terdapat kontradiksi dari peranan tersebut yaitu nelayan lokal tetap saja tidak sejahtera.

Kesejahteraan sendiri memiliki banyak arti dimana masing-masing orang pasti mempunyai perspektif sendiri mengenai apa yang disebut dengan kesejahteraan. Akan tetapi pada umumnya kesejahteraan sendiri secara umum bisa dibagi dalam dua bentuk, yaitu kesejahteraan secara materi dan kesejahteraan secara non materi (Sardar, 2016). Sejahtera sebenarnya merujuk pada tujuan akhir dimana seluruh aktor individu maupun kelompok menginginkan dan mengupayakan hal tersebut karena kesejahteraan menunjukkan suatu kondisi individu atau kelompok berada dalam keadaan makmur sehat, dan damai. Sejahtera dalam arti yang lebih luas diartikan sebagai terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia

memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah maupun batiniah (Sodiq, 2015). Dalam UU No. 11 tahun 2009, tentang Kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara, agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No. 11 Tahun 2009). Sedangkan ukuran atau indikator sebuah kesejahteraan menurut BPS adalah sebagai berikut: (1) Aspek kesehatan, (2) Aspek pendidikan, (3) Aspek curahan waktu (ketenagakerjaan), (4) Aspek taraf hidup dan pola konsumsi, (5) Aspek perumahan, serta (6) Aspek sosial lainnya.

Mengingat dalam pembentukan sebuah lembaga terdapat aturan main maka lembaga yang telah dibentuk tersebut pasti memiliki tugas pokok dan fungsi serta agenda tersendiri dalam peningkatan kesejahteraan penduduk nelayan di Masalembu. Setelah adanya aksi proteksi dari masyarakat nelayan Masalembu tentunya pasti akan memiliki *impact* tersendiri ketika proteksi yang dilakukan adalah untuk menjaga *sustainable* lumbung penghasilannya misalnya setelah adanya proteksi tersebut maka jumlah ikan akan tetap banyak sehingga bukan tidak mungkin bahwa masyarakat terutama nelayan yang ada di Pulau Masalembu perekonomiannya menjadi sejahtera. Dalam penelitian kali ini peneliti mencoba mengambil studi kasus di daerah Kepulauan Masalembu, karena di Pulau Masalembu terdapat 9 lembaga pemberdayaan masyarakat nelayan,

dimana lembaga tersebut sudah pasti memiliki aturan main terhadap nelayan di Masalembu, semua lembaga tersebut sampai dengan saat ini peran, tupoksi serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan (pendapatan) nelayan belum signifikan dan karena Masalembu merupakan pulau yang paling ujung dan rata-rata perekonomian masyarakatnya adalah nelayan jadi kehidupan sehari-harinya bergantung kepada pekerjaan tersebut. Masalembu sendiri adalah pulau yang terdiri dari 4 desa yakni Masalima, Sukajeruk, Masakambing dan Karamean dengan luas wilayah keseluruhan 40.85 kilometer persegi. Peneliti tertarik melakukan penelitian di daerah tersebut karena mengetahui bahwasanya terumbu karang di Masalembu sejauh 10 mil dari pesisir pantai sudah hancur sebagai dampak dari penggunaan alat tangkap cantrang bom dan lain-lain yang dapat merusak karang oleh nelayan luar daerah kemudian melihat dari sisi kelembagaan nelayan Masalembu telah terdapat 9 kelembagaan nelayan namun upaya dalam meningkatkan kesejahteraan (pendapatan) masyarakat nelayannya masih belum signifikan dan bahkan belum jelas.

Mengingat profesi nelayan ini masih dibidang tradisional karena bergantung kepada cuaca kemudian masyarakat nelayan di Masalembu rata-rata masih menggunakan teknologi yang tradisional, baik perahu maupun peralatan (alat tangkap), modal yang digunakan kurang, tingkat pendidikan masyarakat nelayan yang rendah, dan besarnya kecilnya pengaruh peran kelembagaan terhadap masyarakat nelayan, maka hal tersebut juga akan berdampak kepada pendapatan nelayan (Rindawati, 2012). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif sebagai langkah untuk mengetahui fenomena yang tidak bisa dinotasikan dengan angka. Dengan tujuan untuk melihat dan mengetahui bagaimana upaya lembaga nelayan di Masalembu dalam

meningkatkan pendapatan nelayan serta apa yang menyebabkan nelayan Masalembu tidak sejahtera (dilihat dari pendapatannya) sedangkan melihat dari aksi proteksi masyarakatnya sangat keras serta mengingat lembaga nelayan selama ini kontribusinya masih sangat minim dalam pembangunan industri perikanan serta prospeknya belum jelas diketahui pula bahwasanya lembaga nelayan hanya beraktifitas ketika hendak melakukan pesta laut atau selamatan laut saja. Sedangkan menurut Hadi, (2014) Tinjauan kelembagaan nelayan masyarakat pesisir belum banyak dikaji secara lebih mendalam, padahal kekuatan kelembagaan lokal seperti kelembagaan nelayan ini mempunyai peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakatnya (Hadi, 2014)..

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan latar belakang diatas yang mana di Masalembu sendiri sudah terdapat 9 kelembagaan nelayan namun implikasinya dan kontribusinya belum signifikan, kelembagaan nelayan yang ada di Masalembu tersebut kebanyakan hanya beraktifitas ketika hendak melakukan “*Petik Laut*” atau selamatan laut saja sehingga langkah untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraannya masih belum ada. Jadi rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah:

1. Bagaimana upaya peningkatan pendapatan nelayan Masalembu oleh lembaga pemberdayaan masyarakat nelayan di Masalembu?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian kali ini yang menjadi tujuan peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui upaya-upaya peningkatan pendapatan masyarakat nelayan masalembu oleh lembaga pemberdayaan masyarakat nelayan Masalembu.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian kali ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini sebagai salah satu upaya mengkaji ilmu teori ekonomi yang berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Disamping itu, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori guna mengembangkan ilmu teori ekonomi.

2. Manfaat praktis

1. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan dan pertimbangan dalam mengimplementasikan kebijakan berupa perhatian dan tindakan terhadap penggunaan alat tangkap cantrang dan pukat harimau yang merugikan nelayan tradisional. Serta upaya lembaga pemberdayaan masyarakat nelayan dalam meningkatkan pendapatan nelayan khususnya di Kecamatan masalembu.

2. Bagi Mahasiswa

- a. Sebagai bahan informasi bagi pembaca yang ingin mengetahui peran lembaga pemberdayaan masyarakat nelayan Masalembu dalam meningkatkan pendapatan nelayan.

- b. Memberikan pengetahuan bagi mahasiswa serta rujukan bagi penelitian selanjutnya.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan